

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Pengertian Kiai dan Tipologi Kiai

a. Pengertian Kiai

Munurut Zamakhsari Dofier, Kiai merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang ahli dalam agama islam yang mengajarkan beberapa kitab kuning atau kitab klasik kepada para santrinya dan memimpin sebuah pondok pesantren. (Dofier 1982 : 55). Namu demikian, sebutan Kiai sebenarnya tidak melekat pada sosok yang ahli agama yang memimpin pondok pesantren saja. Akan tetapi kata Kiai memiliki konotasi yang sangat luas dan memiliki variasi makna. Di Indonesia sebutan-sebutan bagi orang yang ahli dalam agama islam memiliki banyak variasi. Misalnya, di daerah jawa barat (Sunda), orang menyebut seorang yang ahli agama itu adalah ajengan. Di wilayah Sumatra barat disebut Buya. Di daerah aceh di kenal dengan sebutan Teungku. Hanya di jawa barat saja panggilan Kiai itu melekat pada orang yang ahli dalam bidang ilmu Agama Islam, walaupun ada sebutan lain yaitu Ki Ageng, atau Ki Gede. (Ahmad Jaiz & Zulfikar Akaha, 2001 : 29-30).

Kiai merupakan kata yang tidak asing lagi baik dikalangan pondok pesantren, madrasah, maupun ditengan masyarakat pada umumnya. Kata Kiai biasanya digunakan untuk sebutan bagi para *alim ulama* islam. (Purwodarmino, 1990 : 505). Kata Kiai ini juga digunakan untuk sebutan seorang tokoh

masyarakat yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam ilmu-ilmu agama. Karena kemampuan yang tidak diragukan lagi dalam urusan agama, maupun dalam struktur masyarakat, khususnya di Indonesia. Dalam masyarakat Jawa pada khususnya, sosok Kiai memperoleh pengakuan dan posisi yang sangat penting dalam masyarakat. (Patoni, 2007 : 20). Kiai dianggap sebagai sosok yang luar biasa dan memiliki kekuatan “ajaib”.

Dhofier menyebutkan bahwa kata Kiai banyak digunakan disamping untuk sebuah tokoh agama, juga untuk gelar benda-benda pusaka, dan lainnya seperti yang ada di bawah ini. (Dhofier, 1982 : 55).

- a. Kata Kiai merupakan sebutan untuk benda-benda kramat, benda-benda pusaka atau barang terhormat. Seperti Kiai pleret, untuk sebutan tombak di keraton Surakarta. Kiai Garuda Kencana untuk sebutan Kereta Emas keraton Yogyakarta, bahkan sebutan Kiai juga melekat pada seekor kerbau di keraton Surakarta yaitu Kiai Slamet.
- b. Gelar Kiai juga digunakan untuk penghormatan kepada orang-orang tua atau tokoh masyarakat. Gelar ini terkait pada pigur posisi seseorang yang terhormat di masyarakat. Dalam tradisi Jawa biasanya gelar ini di singkat menjadi Ki. Transfusi gelar dari Kiai menjadi Ki berasal dari kerajaan-kerajaan Jawa di masa lalu. Seperti Ki Buyut, Ki Ageng, dan sebagainya. Pemberian gelar Ki juga bukan semata-mata gelar penghormatan saja, tetapi ini adalah

sebuah pengakuan masyarakat kepada tokoh tertentu yang memiliki kemampuan atau “keahlian khusus” dalam sebuah bidang tertentu. Dan gelar ini timbul secara alami berdasarkan keikhlasan pandangan masyarakat umum.

- c. Gelar Kiai juga diberikan oleh masyarakat untuk orang yang ahli dalam bidang agama islam yang memiliki atau memimpin pondok pesantren yang mengajarkan kitab klasik kepada para santrinya.

Pemberian gelar Kiai tidak seperti pemberian gelar yang diberikan kepada pejabat pemerintahan seperti kepala Desa, Camat, Bupati Gubernur dan yang lainnya. Pemberian gelar Kiai adalah murni yang diberikan oleh masyarakat secara ikhlas dengan melihat kapasitas keilmuan terhadap Kiai tersebut. Pigur Kiai sangat istimewa dimata masyarakat jika dibandingkan dengan para pejabat tinggi diatas. Hal ini terbukti jika sang Kiai meninggal, sepuluh tahun yang akan datang belum tentu ada yang mempunyai karakter yang sama untuk menggantikannya. Tetapi apabila pejabat meninggal mungkin langsung bisa mencari sosok yang mempunyai karakter yang sama. (Thoha, 2003 : 172)

Biasanya, ketokohan antar Kiai adalah sebuah dampak dari tindak lanjut sebuah kepemimpinan Kiai pesantren. Berdasarkan hasil penelitian Pradjarta Dirdjosanjoto, yang melakukan penelitian sejumlah Kiai di Pati jawa tengah,

bahwa sumber kewibawaan Kiai terletak pada lima faktor yang mempengaruhinya. (Dirdjosanjoto, 1999 : 155-158), yaitu :

- a. Kewibawaan Kiai didasarkan pada superioritas dalam bidang agama yang melebihi orang awam. Kiai tidak dipandang sebagai tokoh agama tetapi juga memiliki kekuatan supranatural.
- b. Kewibawaan Kiai didasarkan atas sebuah kenyataan yang menunjukkan bahwa Kiai pesantren tidak saja berkedudukan sebagai guru, pemimpin pesantren, tetapi Kiai sebagai pemilik pesantren. Sehingga kedudukan Kiai memberikan otoritas yang sangat kuat di lingkungan pesantren.
- c. Kewibawaan Kiai didasarkan atas adanya jaringan antar Kiai yang bersumber dari beberapa basis pesantren baik melalui perkawinan, maupun persaudaraan atau yang lainnya.
- d. Kewibawaan Kiai juga didasarkan atas adanya relasi Kiai dengan pemerintah dan pusat-pusat kekuasaan di luar seperti partai politik, LSM, ataupun organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU)
- e. Kewibawaan Kiai juga didasarkan atas kualitas secara pribadi dalam penguasaan ilmu keagamaan, terhadap hukum islam, dan faktor keturunan. Karena dalam tradisi masyarakat jawa orang yang memiliki keturunan Kiai atau anak Kiai dipandang sebagai orang

yang memiliki ilmu laduni ilmu pemberian Allah swt yang dibawa sejak lahir.

Kemudian yang jadi pertanyaan adalah apakah sama antara Kiai, ulama, dan ustadz? Sepertinya apabila kita melihat fenomena di masyarakat antara ketiga kata tersebut memiliki kerancuan makna. Anggapan masyarakat bahwa Kiai, ulama, dan ustadz adalah satu kesatuan makna yaitu seorang pengajar agama islam atau guru *ngaji*. Namun sebenarnya kata tersebut terdapat sedikit perbedaan yang mencolok.

Di Indonesia seperti yang ditulis oleh Turmudi, penggunaan istilah ulama' berbeda dengan istilah Kiai. Untuk membedakan istilah Kiai dan ulama' bisa di lihat dari pengaruh dan perannya di masyarakat. Ulama' adalah istilah yang lebih umum yang merujuk pada pribadi muslim yang berpengetahuan. Kaum ulama' adalah kelompok yang secara jelas mempunyai fungsi dan peran sosial sebagai cendekiawan penjaga tradisi yang dianggap sebagai dasar identitas primordial individu dan masyarakat. Dengan kata lain, fungsi ulama' yang terpenting adalah peran ortodoks dan tradisi mereka sebagai penegak keimanan dengan cara mengajar doktrin-doktrin agama dan memelihara amalan-amalan keagamaan dikalangan umat islam. (Turmudi, 2004 : 29).

Namun kalua kita lihat secara Bahasa, kata Ulama' adalah bentuk jama' dari kata *al-aliim*, yang berarti memiliki pengetahuan. (Patoni, 2007 : 27). Selain itu, juga di ambil dari kata *al-alim* yang berarti mengetahui secara jelas.

(Shihab, 2002 : 467). Namun demikian, menurut Patoni kata ulama' selalu diikuti dengan ajakan untuk merenungi alam semesta.

Penggunaan kata *al ulama'* dalam al-Quran selalu diawali dengan ajakan untuk merenungi keadaan alam, sedangkan kata *al alimun* merenungi peristiwa yang sudah terjadi sebagai bahan evaluasi. Adapun penggunaan kata *al alim* dalam bentuk tunggal semuanya mengacu hanya kepada Allah, dan selalu diiringi dengan penciptaan bumi dan langit serta hal-hal yang berkaitan dengan ghaib dan yang nyata. (Patoni, 2007 : 28)

Kedudukan dan kemuliaan para ulama' telah diabadikan di dalam al-Quran, surat *Al-Faathir* ayat 28 yang artinya :

Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah *Ulama'*. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun.

. b. Tipologi Kiai

Dalam banyak studi mengenai Kiai, maka Kiai dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok (Turmudi, 2004 : 23), yaitu :

- a. Kiai Pesantren, adalah Kiai yang memusatkan perhatiannya pada pendidikan di pondok pesantren untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan di pondok pesantren. Disini kemudain terjalin hubungan

kekerabatan antara Kiai dan santri dan membuat lingkungan baru yaitu pondok pesantren.

- b. Kiai Tarekat, adalah Kiai yang memusatkan pada kegiatan-kegiatan membangun batin (dunia hati) umat islam. Kiai tarekat ini biasanya mempunyai lebih banyak pengikut dibandingkan dengan Kiai pesantren.
- c. Kiai politik lebih merupakan kategori campuran. Namun ia lebih *concern* dalam masalah politik praktis, baik terjun sebagai struktural maupun sebagai juru kampanye sebuah partai politik.
- d. Kiai panggung, adalah Kiai yang memusatkan pada kegiatan dakwah untuk mengembangkan ajaran islam. Biasanya pengikut Kiai ini tersebar di beberapa daerah. Namun demikian tidak semua Kiai panggung memiliki banyak pengikut. Hal ini tergantung pada tingkat kepopuleran sang Kiai tersebut dalam berdakwah.

2.2 Politik

a. Pengertian Politik

ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau *politics* atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah *gemah ripah loh jinawi*. Orang Yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai *en dam onia* atau the good life. (Budiardjo, 2008 : 13). Mengapa politik dalam arti ini begitu penting? Karena

sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam, atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Ini adalah politik.

Bagaiman caranya mencapai tujuan yang mulia itu? Usaha itu dapat dicapai dengan berbagai cara, yang kadang-kadang bertentangan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki suatu kekuasaan disuatu wilayah tertentu (Negara atau Sistem Politik). Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada.

Para sarjana politik cenderung untuk menekankan salah satu saja dari konsep-konsep ini, akan tetapi selalu sadar akan pentingnya konsep-konsep lainnya. Dengan demikian kita sampai pada kesimpulan bahwa politik dalam suatu negara (state) berkaitan dengan masalah kekuasaan (Power) pengambilan keputusan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi.

Kata politik belum memiliki istilah yang baku, artinya masih terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli politik dalam mendefinisikannya, diantara para tokoh yang telah mendefinisikan kata politik adalah:

- a) Menurut Rod Hague *et al.* Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya. (Hague et al, 1998 : 3)
- b) Menurut Andrew Heywood. Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. (Heywood, 1997 : 4)
- c) Deliar Noer seperti yang dikutip oleh Abdul Mu'in salim, politik adalah segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.
- d) Menurut Mariam budiarjo yang juga dikutip oleh Abdul Mu'in salim, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (suatu negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu.
- e) Menurut Imam Syafi'i politik adalah "hal-hal yang sesuai dengan syara".

- f) Menurut Ibnu Aqil “politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rasulullah saw. Ataupun dibawa oleh Allah swt.

2.3 Kiai Terlibat dalam Politik Praktis

Berpusat pada peranannya sebagai guru mengaji dan ahli agama, para Kiai seringkali memainkan peran penting dalam bidang sosial, kemasyarakatan, dan politik. (Dirdjosanjoto, 1999 : 187). Peranan sosial, Kiai sering diminta pertolongan oleh masyarakat untuk memberikan perantaraan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Peran dalam kemasyarakatan, Kiai sering diundang dalam rapat-rapat baik lokal maupun nasional. Dalam bidang politik, sekarang ini banyak Kiai yang terlibat dalam politik praktis baik langsung maupun tidak langsung. Kiai langsung terlibat dalam politik, seperti mengurus menjadi partai politik, juru kampanye, ataupun sebagai anggota legislatif. Adapun secara tidak langsung, Kiai hanya memberi dukungan kepada partai politik maupun dukungan kepada calon baik legislatif maupun eksekutif.

Keterlibatan Kiai dalam politik praktis bukan fenomena yang baru lagi. Sejak lama peran serta Kiai dalam politik sangat besar. Secara normative keterlibatan Kiai dalam politik mendapatkan dasar hukum yang kuat dari syari'at. Secara empiris, keterlibatan Kiai sebagai tokoh politik telah

dicontohkan oleh Rosulullah. Dasar normatif dan empiris inilah yang menjadi motivasi Kiai berpolitik.

Dalam sejarah Indonesia, sejak dahulu Kiai sudah terlibat dalam masalah politik, baik dalam pra-kemerdekaan, orde lama, orde baru, maupun pada masa reformasi ini, walaupun kuantitas dan kualitas setiap periode berbeda-beda. Kiai mempunyai andil yang cukup besar dalam proses perwarnaan politik di Indonesia. (Patoni, 2007 : 152-153)

Ada keterkaitan antara Kiai pesantren, organisasi Nahdlatul Ulama (NU), dan dunia politik. NU sebagai organisasi keagamaan yang sudah berdiri sejak tahun 1926, yang di dirikan oleh para ulama. Pesantren telah banyak memainkan peran penting dan sangat berpengaruh baik dunia politik maupun masyarakat Indonesia. Di antara pendiri organisasi tersebut adalah K.H Hasyim As'ari, dan K.H Abdul Wahab Hasbullah. (Effendi yusuf, syam, mas'udi, 1983 : 18)

Kiai yang mempunyai pengaruh besar tersebut, (baik dilingkungan NU, pesantren, maupun masyarakat), memiliki kekuatan baru dalam pentas politik di Indonesia. Umumnya seorang Kiai pesantren disamping memiliki massa dipesantren, juga memiliki massa dikalangan tradisional lainnya. Hal ini memiliki nilai tersendiri bagi kalangan politisi. Kiai yang mempunyai pengaruh tersebut kemudian memiliki posisi strategis dalam konstalasi politik. (Patoni,

2007 : 172) Sejak beberapa tokoh NU mendeklarasikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), banyak Kiai yang masuk kedalamnya baik melalui struktur maupun pendukung, meskipun banyak Kiai yang masuk ke partai lain seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, PDIP, dan yang lainnya.

2.4 Keterlibatan Kiai dalam politik praktis

Keterlibatan para Kiai dan ustadz dalam politik praktis sangat beraneka ragam. Beberapa wujud keterlibatan Kiai dalam politik praktis adalah sebagai berikut :

1. keterlibatan Kiai sebagai pengurus struktural partai politik

keterlibatan ini biasanya Kiai dan ustadz secara langsung menjabat sebagai pengurus partai politik baik di tingkat lokal maupun nasional.

2. Keterlibatan Kiai sebagai calon legislatif dan eksekutif

Seorang Kiai atau ustadz dalam hal ini langsung mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik sebagai calon legislatif maupun eksekutif.

3. Keterlibatan Kiai sebagai dalam dukungan suara dan kampanye

Wujud dukungan suara yang diberikan oleh Kiai atau ustadz biasanya diberikan kepada calon yang dikehendaki baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, misalnya Kiai secara terbuka mendukung partai politik. Sedangkan secara tidak langsung, biasanya para politisi memohon

sendiri kepada Kiai dengan cara minta doa restunya serta memilih partai politik, calon legislatif, maupun eksekutif yang mereka inginkan.

2.5 Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis

Menurut Ahmad Patoni, alasan yang mempengaruhi seorang Kiai terlibat dalam politik praktis adalah :

1. Alasan Teologis, para Kiai pesantren adalah pigur yang lekat dengan penguasaan khazanah ilmu-ilmu keislaman yang bercorak *sunni*. Dalam perspektif ini, hubungan antara agama dan politik antara tradisi *sunni* pada dasarnya mempunyai hubungan dan tidak bisa dipisahkan secara tegas. Politik dan agama dinilai sebagai bagian integral dari agama, dan oleh Karena itu tidak bisa dijauh. (Patoni, 2007 : 153)
2. Alasan Dawah. Da'wah merupakan usaha sosialisasi terhadap nilai-nilai keislaman kepada masyarakat. Sebagai usaha untuk menyebarkan nilai-nilai yang terkandung didalam ajaran agama, banyak metode yang ditempuh. Salah satunya adalah jalur politik. Banyak Kiai yang berasumsi bahwa dengan lewat jalur politik ini, medan dakwah akan semakin luas, terbuka dan akan berjalan dengan efektif.
3. Alasan solidaritas politik yang sulit dihindari sehingga menjadikan Kiai pesantren mau tidak mau harus terjun kedalamnya.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan Kiai dalam politik praktis menurut khoiru ummatin. (Ummatin, 2002 : 32-33) adalah :

1. Faktor kekuasaan, meliputi cara-cara untuk mencapai hal yang diinginkan melalui sumber- sumber kelompok yang ada di masyarakat.
2. Faktor kepentingan, merupakan tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik. Untuk mrncapai kepentingan ini manusi harus memiliki kekuasaan, kesehatan, keterampilan, kasih sayang, keadilan dan kejujuran.
3. Faktor kebijaksanaan sebagai hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan yang biasanya berbentuk perundang-undangan.
4. Budaya politik, merupakan orientasi subyektif individu terhadap sistem politik. Kebudayaan politik sebagai orientasi nilai dan keyakinan politik yang melekat dalam diri individu dapat dianalisis dalam beberapa orientasi, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan orientasi evaluative yang mendasari perilaku politik.

a. Teori Kekuasaan

Harold D. Laswell (1984 : 9) berpendapat bahwa kekuasaan secara umum berarti “ kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai

dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan”. Kekuasaan juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pikiran atau tingkah laku orang atau kelompok orang lain, sehingga orang yang dipengaruhi itu mau melakukan sesuatu yang sebetulnya orang itu enggan melakukannya. Bagian terpenting dari adanya kekuasaan adalah syarat adanya keterpaksaan, yakni keterpaksaan pihak yang dipengaruhi untuk mengikuti pemikiran ataupun tingkah laku pihak yang mempengaruhi. (Mas’oed dan Nasikun, 1987 : 22)

Robert M. MacIvler (dalam Budiarjo, 2004: 36) mengemukakan teori kekuasaan sebagai bagian dalam suatu masyarakat piramida, ini terjadi karena kenyataannya kekuasaan yang satu membuktikan dirinya lebih unggul dari pada yang lainnya. Hal mana berarti bahwa yang satu itu lebih kuat dengan mengkoordinasikan kekuasaan lainnya. Atau dengan kata lain struktur piramida kekuasaan itu terbentur oleh kenyataan dalam sejarah masyarakat, bahwa golongan yang berkuasa (dan yang memerintah) itu relatif selalu lebih kecil jumlahnya dari pada golongan yang dikuasainya.

Berhubungan erat dengan masalah kekuasaan adalah pengaruh (*influence*) sehingga sering dikatakan bahwa pengaruh adalah bentuk lunak dari kekuasaan. Dalam hal ini biasanya seseorang yang mempunyai kekuasaan juga mempunyai pengaruh di dalam dan di luar bidang kekuasaannya. Tetapi tidak semua orang mempunyai kekuasaan yang sama, mempunyai pengaruh yang

sama besarnya karena masalah pengaruh berkaitan dengan pribadi seseorang yang memegang kekuasaan. Misalnya kekuasaan seorang Kiai A sama dengan seorang Kiai B, tetapi pengaruh Kiai A belum tentu sama dengan pengaruh Kiai B di lingkungan penduduknya atau di lingkungan pesantrennya. Selain itu pengaruh juga tidak selalu identik dengan kekuasaan sebab ada orang yang tidak mempunyai kedudukan (yang dengan sendirinya tidak mempunyai kekuasaan) tetapi mempunyai pengaruh., jadi arti pengaruh tidak sama dengan kekuasaan.

b. Teori Elite

Salah satu aspek yang dikaji dalam sistem politik atau kehidupan bernegara adalah masyarakat. Masyarakat dibagi atas dua kelas yaitu, masyarakat kelas elit dan kelas masyarakat non elit atau masyarakat pada umumnya. Dan masyarakat kelas elit dibedakan atas elit yang berkuasa (elit politik/elit penguasa) dan elit yang tidak berkuasa.

Menurut Laswell berpendapat mengenai elit politik mencakup semua pemegang kekuasaan dalam satu bangunan politik. Elit ini terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominant dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Ada juga menurut Mills berpendapat tentang elit bahwa elit adalah mereka yang memiliki posisi komando pada pranata-pranata utama dalam

masyarakat. Dengan kedudukan-kedudukan tersebut para elit mengambil keputusan-keputusan yang membawa akibat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Masih terus berlangsungnya konflik antar elite politik dan kelompok-kelompok politik atas dasar perbedaan ideologi dan kepentingan politik sesaat yang dilatarbelakangi kuatnya kepentingan pribadi dan kelompok ketimbang memerhatikan bangsa dan negara (Natsir, 2010 : 27)

Dalam pengertian yang umum elit menunjuk pada sekelompok orang-orang yang ada dalam masyarakat yang menempati kedudukan tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan minoritas yang memegang kekuasaan.

Dalam pengertian sosiologis dan politis, elit adalah *the ruling class*, suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukannya itu, mereka dapat memengaruhi perkembangan masyarakat yang hubungannya timbal balik. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa elite adalah produk dari masyarakatnya. Dan, hubungan antar elite senantiasa terjalin komunikasi sehingga kreasi maupun semangat dari suatu generasi dilanjutkan atau diteljemakan ke dalam bentuknya yang baru oleh generasi berikutnya.

Ada dua golongan yang menjadikan sebagai elit politik. Yaitu, elit politik lokal dan elite non politik non lokal. elit politik lokal adalah merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik di eksekutif dan di legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis di tingkat lokal. sedangkan elit non politik non lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elite non politik ini seperti: elite keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya. Perbedaan tipe elite lokal ini diharapkan selain dapat membedakan ruang lingkup mereka, juga dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar-elite politik maupun elite mesyarakat dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di tingkat lokal. (S.P Varma, 1987 :203)

Menurut Karl Marx, elite politik terdapat tiga macam, di mana elite dapat berubah dengan melalui revolusi. Diantaranya: pertama, Metode Posisi, elite politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam sistem politik. Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama Negara. Elite ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, perpol, kelompok kepentingan. Para elite politik ini setiap hari membuat keputusan penting untuk melayani berjuta-juta rakyat. Kedua, Metode Reputasi, elite politik ditentukan berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan

dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Ketiga, Metode Pengaruh, elite politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elite politik. Oleh karena itu orang yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai elite politik.

2.6 Kerangka pemikiran

Penelitian ini menggunakan teori utama yaitu teori elite yang dikemukakan oleh Karl Marx dan juga Laswell, salah satu pendapat dari Karl Marx yaitu menjelaskan elite dalam tiga metode salah satunya yaitu metode pengaruh. Dimana elit politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimilikinya, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elite politik. Sama halnya dengan seorang Kiai di Pondok Pesantren yang merupakan pigur bagi masyarakat dan juga santri yang memiliki pengaruh bagi masyarakat dan juga santri itu sendiri maka otomatis akan mentaati pada perintah dan juga ajakan dari Kiai itu sendiri. Karena Ketika seorang Kiai yang mempunyai pengaruh tersebut bisa dikatakan elite non politik non lokal Ketika berada di lingkungan pesantren dan masyarakat, dan juga Ketika ikut atau terlibat dalam politik

praktis yang menduduki posisi yang strategis yang juga bisa disebut elit politik lokal.

2.7 Peneliti terdahulu :

No	Nama Peneliti	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	DITA ADISTIA (2016) Topik : <i>sikap politik Kiai dan santri pondok pesantren al-Hikmah terhadap pencalonan thobroni harun dan komarunizar dalam pemilihan walikota dan wakil walikota bandar lampung tahun 2015</i>	Fokus penelitian ini menekankan sikap politik Kiai dan santri dalam suatu pemilihan umum walikota dan wakil walikota khususnya dalam aspek suatu hak suara supaya mendukung calon dari thobroni harun dan komarunizar sebagai walikota dan wakil walikota bandar lampung	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang yang ada permasalahan di dalam ruang lingkup pesantren.	perbedaan dalam fokus penelitian, peneliti ini menekankan kepada permasalahan pemilu yang melibatkan Kiai dan santri untuk mendukung suatu calon walikota dan wakil walikota. Sedangkan penulis memfokuskan pada dampak dari perilaku Kiai yang terjun dalam politik praktis terhadap santri khususnya dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari
2.	MAHFUD IHSANUDIN (2015) Topik : <i>PESANTREN DAN DINAMIKA POLITIK LOKAL (Studi Kasus Pondok Pesantren Assalam, Desa Sri Gunung, Kecamatan</i>	Penelitian ini memfokuskan pada perilaku politik masyarakat pondok pesantren assalam pada tahun 1998-2010. Pada awalnya, lembaga pendidikan yang netral dari afiliasi partai politik tertentu, kemudian pada tahun 1998 masyarakat pesantren mendirikan	Persamaan dalam peneliitian ini yaitu sama-sama mengkaji atau meneliti tentang hubungan antara pesantren dan politik. Tetapi peneliti ini menambahkan	Perbedaan penelitian tidak hanya terkait dengan fokus penelitian, tetapi dengan objek penelitian. Peneliti ini tidak hanya memiliki satu objek penelitian atau tidak hanya Kiai dan Masyarakat Pesantren saja melainkan dengan

	<p><i>Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, 1998-2010</i></p>	<p>Partai keadilan PK kalau sekarang menjadi PKS di Kabupaten Musi Banyuasin. Pada pemilu kada 2009, terjadi perbedaan dukungan terhadap calon gubernur Sumatra selatan, hingga pesantren assalam memutus hubungan dengan PKS dan melarang semua kegiatannya di pesantren. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini memfokuskan bagaimana situasi sosial-politik di kabupaten musu banyuasin, lalu bagaimana perkembangan pondok pesantren assalam serta mengapa Pondok Pesantren Assalam ikut serta dalam kancah politik.</p>	<p>tentang hubungan sosial maupun politik baik dengan masyarakat pesantren dan juga partai politik itu sendiri</p>	<p>membahas hubungan sosial-politik pasca pemilu kada dengan partai politik yaitu PKS. Sedangkan penulis memfokuskan atau membahas mengenai akibat dari Kiai yang terlibat dalam politik praktis dan juga pengaruh terhadap santrinya saja.</p>
--	--	--	--	---